

**MONITORING DAN EVALUASI ATAS 3 NILAI TERENDAH SURVEI ZI
LAPORAN SURVEI PERSEPSI ANTI KORUPSI (SPAK)
TRIWULAN II PERIODE TANGGAL 1 APRIL 2023 SAMPAI DENGAN 30 JUNI 2023**



TAHUN 2023

**MONITORING DAN EVALUASI ATAS 3 NILAI TERENDAH SURVEI ZI
LAPORAN SURVEI PERSEPSI ANTI KORUPSI (SPAK)
TRIWULAN II PERIODE TANGGAL 1 APRIL 2023 SAMPAI DENGAN 30 JUNI 2023**

NO	MONITORING	EVALUASI	TINDAK LANJUT
	3 (tiga) nilai terendah dari Unsur Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK) Triwulan II Tanggal 1 April 2023 s.d. 30 Juni 2023	<p>Dari hasil pengolahan data SiSuper Pengadilan Negeri Palembang SPAK Periode Triwulan II Tanggal 1 April 2023 s.d. 30 Juni 2023, jumlah tersebut didapat dari data SiSuper di anjungan area PTSP dan surat yang dikirimkan ke Satker Pengadilan Negeri di wilayah hukum Pengadilan Negeri Palembang untuk mengisi SiSuper.</p> <p>Terdapat 3 nilai terendah dari 5 unsur Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK) yaitu :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. U1 Dengan Nilai 166; 2. U4 Dengan Nilai 171; 3. U5 Dengan Nilai 172; 	<p>➤ Rekomendasi atas monev 3 (tiga) nilai terendah agar segera dilaksanakan untuk perbaikan terhadap pelayanan Pengadilan Negeri Palembang.</p>
1	Unsur Survei Persepsi Anti Korupsi: Tindakan Diskriminasi (U1)	<p>> Unsur Tindakan Diskriminasi merupakan Unsur ke-1 dari 5 Unsur SPAK, dengan pertanyaan sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Apakah tidak ada diskriminasi pada pelayanan yang disampaikan pada unit layanan ini ? 	<p>Rekomendasi:</p> <p>➤ Melaksanakan brifing Hakim pengawas PTSP serta didampingi Panitera dan Panmud untuk memberitahukan dan mengarahkan kepada petugas PTSP untuk tidak melakukan tindakan diskriminasi kepada pengguna layanan;</p>

2	Praktik Pungutan Liar (U4)	<p>> Unsur Biaya Tambahan merupakan Unsur ke-4 dari 5 Unsur SPAK, dengan pertanyaan sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Apakah tidak ada pungutan liar seperti permintaan pembayaran atas layanan yang diterima pengguna layanan di luar tarif resmi pada unit layanan ini ? 	<p>Rekomendasi:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Telah tersedia akses informasi mengenai tarif/biaya pada website Pengadilan Negeri Palembang ➤ Petugas PTSP menjelaskan terkait biaya yang dibutuhkan dalam setiap layanan serta selalu memberikan kwitansi / Tanda Terima pada setiap transaksi yang dilakukan;
3	Praktik Percaloan (U5)	<p>> Unsur Biaya Tambahan merupakan Unsur ke-5 dari 5 Unsur SPAK, dengan pertanyaan sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Apakah tidak ada praktek percaloan/perantara yang tidak resmi yang diterapkan pada unit layanan ini ? 	<p>Rekomendasi:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Melaksanakan briefing Hakim pengawas PTSP serta didampingi Panitera dan Panmud untuk memberitahukan dan mengarahkan kepada petugas PTSP untuk tidak melakukan praktik percaloan/perantara yang tidak resmi

Demikianlah monitoring dan evaluasi atas 3 (tiga) Nilai Terendah dari Survei ZI Laporan Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK) terhadap pelayanan di Pengadilan Negeri Palembang Triwulan Ke-II Tanggal 1 April 2023 sampai dengan 30 Juni 2023.

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1	EDDY CAHYONO, SH.,MH	Hakim (Koordinator IPK)	
2	MUHAMAD AFIUDIN, SH.,MH	Panitera Muda Hukum	

Eviden tindaklanjut Survei Persepsi Anti Korupsi

Point 1



BRIEFING PETUGAS PTSP

Point 2

The screenshot shows the 'Prosedur Berperkara' website. At the top, there is a red banner with the title 'Prosedur Berperkara' and a brief description. Below the banner is a navigation bar with icons for 'Denda Tilang', 'Surat Keterangan', 'E-Court', 'Direktori Putusan', 'Info Perkara', and 'Pengaduan'. The main content area is divided into two sections: 'Menu Layanan Publik' on the left and 'Biaya Perkara' on the right. The 'Biaya Perkara' section lists various court fees and their amounts, such as 'PNPB' (Rp. 10.000,-), 'Redaksi' (Rp. 5.000,-), 'Materi' (Rp. 10.000,-), 'Penyerahan Salinan' (Rp. 500,-), 'Putusan @ lembar' (Rp. 10.000,-), and 'Leges' (Rp. 10.000,-). There are also checkboxes for 'FNPB', 'Redaksi', 'Materi', 'Penyerahan Salinan', 'Putusan @ lembar', and 'Leges'. The website footer includes the logo of the Indonesian Judiciary and the text 'Sistem Peradilan Nasional Berbasis Elektronik'.

BIAYA PERKLARA PADA WEBSITE

The photograph shows a handwritten receipt from the 'PENGADILAN NEGERI/HUBUNGAN INDUSTRIAL/TINDAK PIDANA KORUPSI PALEMBANG KELAS IA KHUSUS'. The receipt is dated '5 Juli 2023' and is signed by the cashier. The receipt lists the following items and amounts:

Item	Amount
PNPB	Rp. 10.000,-
Redaksi	Rp. 5.000,-
Materi	Rp. 10.000,-
Penyerahan Salinan	Rp. 500,-
Putusan @ lembar	Rp. 10.000,-
Leges	Rp. 10.000,-
Photo copy @ lembar	Rp. 300,-
Sempul	Rp. 6.000,-
Orngkos Photo copy	Rp. 10.000,-
Biaya Jild	Rp. 10.000,-
	Rp.

The receipt also includes a section for 'TANDA TERIMA' (Receipt) with a handwritten amount of 'Rp. 10.000,-' and a signature. The cashier's name is 'KASIR' and the date is '5 Juli 2023'. The receipt is signed by the cashier and has a stamp from the court.

KWITANSI / TANDA TERIMA BIAYA

Point 3



BRIEFING PETUGAS PTSP